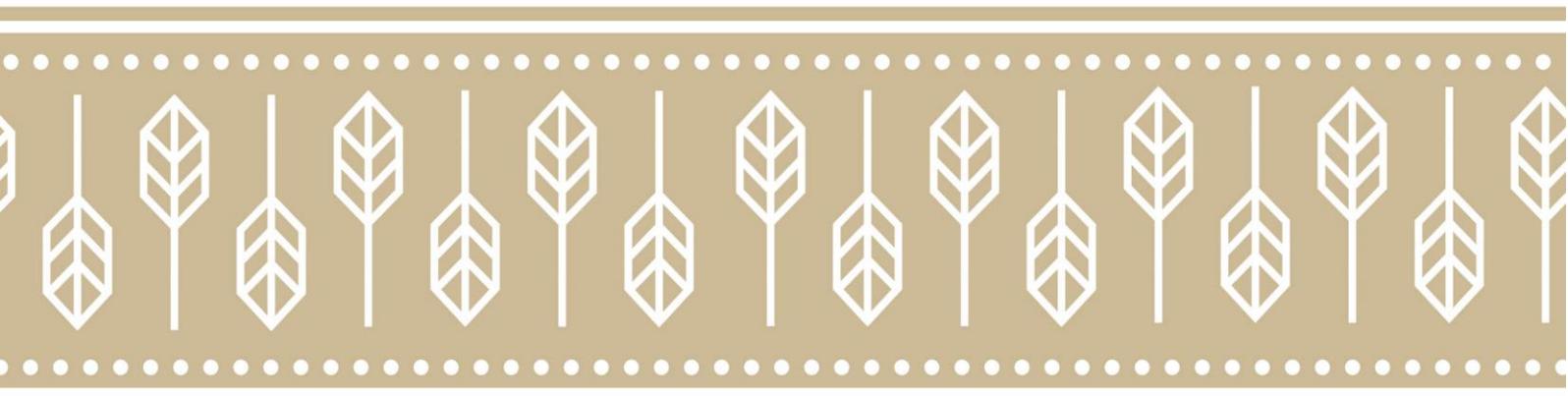


## Bab 1

### Pendahuluan

Penulisan sitasi untuk bab ini

Widiana, A., G.Hadiwidjaja, M. Sapulette dan E. Simarmata (2023), 'Pendahuluan' dalam Widiana, A., G.Hadiwidjaja, M. Sapulette dan E. Simarmata (eds.) *Membangun UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia Timur*. Jakarta: ERIA dan Kementerian Perdagangan, pp.1-5.



# Pendahuluan

Anika Widiana, Grace Hadiwidjaja, Elitua H. Simarmata, Militcyano S. Sapulette

Pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang paling terdampak negatif oleh pandemi COVID-19. Pembatasan sosial dan fisik sebagai langkah memitigasi penyebaran pandemi membuat sektor ini lesu. Kendati telah Kembali bergeliat sejak akhir 2021, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku menuju kebiasaan baru (*new normal*) yang mengharuskan sektor parekraf untuk dapat beradaptasi dengan cepat.

Lebih lanjut, paradigma perubahan perilaku menuju *new normal* mengharuskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyusun strategi bisnis, menguasai kemampuan, dan memiliki orientasi baru yang lebih relevan. UMKM berperan besar dalam perekonomian, termasuk di sektor parekraf. Tidak hanya itu, UMKM telah lama hadir sebagai motor perekonomian bagi penduduk miskin, perempuan, dan mereka dengan tingkat pendidikan rendah (kelompok marginal).

Indonesia Timur memiliki tingkat pembangunan yang rendah dibanding dengan wilayah lain di Indonesia. Pandemi COVID-19 serta *scarring effect* yang menyertainya secara tidak proporsional lebih merugikan kelompok marginal, utamanya di daerah dengan tingkat pembangunan rendah seperti di Indonesia Timur. Gejolak perekonomian global sejak 2022 juga merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia timur untuk dapat mengakselerasi pembangunan ekonominya.

Sektor parekraf, jika dikelola dengan sesuai dalam menyikapi *new normal*, dapat menjadi penggerak pengembangan di Indonesia Timur. Sebagaimana akan diuraikan dalam buku ini. Indonesia Timur kaya akan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, UMKM yang juga dapat berperan dalam inklusivitas perekonomian bagi kaum marginal, dapat hadir sebagai motor dalam gerakan ini. Merealisasikan niat ini membutuhkan peran berbagai pemangku kepentingan.

Buku terdiri dari tujuh bagian yang fokus pada permasalahan terkait parekraf dan UMKM di Indonesia Timur: Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Setiap bab mengandung rekomendasi yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari berbagai *stakeholders*, utamanya oleh pemerintah daerah dan pusat.

**Bab 2** oleh Suryani Eka Wijaka dan Kemala Febrihadini menganalisis struktur pemerintahan yang ideal dalam rangka pengembangan UMKM industri kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdaya saing. Analisis dititikberatkan pada strategi integral UMKM berdaya saing; analisis *strength*, *weakness*, dan *threat* (SWOT) pengembangan UMKM industri kreatif di NTB; juga pemetaan tugas dan fungsi elemen pemerintahan dalam kerangka integrasi horizontal pengembangan UMKM industri kreatif.

Kajian ini menemukan bahwa penetapan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah menjadi faktor pendukung untuk perwujudan



daya saing UMKM industri kreatif ini di tingkat nasional maupun global. Namun, beberapa hal masih perlu ditingkatkan dalam hal tata laksana dan tata kelolanya sesuai dengan pendekatan integrasi horizontal berdasarkan konsep *Multi-level Governance*. Terlaksana program/kegiatan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih di antara para pelaksana, yang akhirnya akan membawa dampak yang lebih signifikan pada penguatan dan pengembangan UMKM industri kreatif NTB.

Organisasi perangkat daerah di Provinsi NTB perlu menumbuhkan ide baru mengenai alternatif program/kegiatan serta mencoba pendekatan baru untuk implementasi pengembangan UMKM industri kreatif di NTB. Inovasi tata laksana dan tata kelola yang disusun secara terstruktur dan sistematis diperlukan pada organisasi yang terlibat langsung untuk pengembangan industri kreatif. Mengingat pentingnya koordinasi ini, pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagai koordinator pengembangan UMKM industri kreatif NTB perlu dipercepat. Selanjutnya, BAPPEDA Provinsi NTB sebagai pendistribusi anggaran, dapat memastikan pembagian anggaran program sudah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai yang dicanangkan Badan Ekonomi Kreatif Daerah.

**Bab 3** oleh Rambu Raing McCullagh menceritakan dinamika dan tantangan yang dihadapi seni dan usaha kreatif kain tenun Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba, kain tenun adalah elemen yang mempunyai peran penting pada proses-proses adat dan juga berpotensi besar dalam menunjang peningkatan ekonomi rumah tangga juga perempuan yang merupakan mayoritas penenun.

Kajian ini mengidentifikasi permasalahan serta perubahan fisik dan non-fisik dalam seni tenun Sumba Timur. Peneliti mendeskripsikan kecenderungan perubahan yang terjadi yang terkait dengan perubahan fisik: motif, struktur, ukuran dan warna; dan juga perubahan non fisik: terkait dengan produksi, pasar, peruntukan, institusi lokal dan kebijakan (perlindungan dan kepastian hukum).

Kajian ini menghasilkan tujuh poin rekomendasi utama yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur penting guna memberdayakan lebih lanjut usaha seni tenun Sumba Timur: (1) pelatihan bisnis, utamanya *marketing*, bagi para penenun; (2) pemberdayaan perempuan melalui usaha tenun; (3) pembangunan pasar sentra kain tradisional di Sumba Timur; (4) edukasi konsumen terkait kain tenun Sumba Timur; (5) pembentukan institusi lokal yang dapat menaungi penenun; (6) dorongan kepastian hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual tenun Sumba Timur; serta (7) pembangunan rumah data dan informasi untuk melestarikan kesenian tenun Sumba Timur.

**Bab 4** oleh Christoforus Adri Pieter Koleangan, Jeane Budhi, dan Amanda Archangela melakukan kajian yang menganalisis hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pengembangan UMKM parekraf di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan *tourism satellite account* (TSA) dan SWOT.

Kajian ini menyimpulkan bahwa *supply* produk/jasa sektor pariwisata yang masih dapat dioptimalkan oleh UMKM Sulut adalah sebesar Rp10.872 triliun. Sinergitas antara pemerintah, UMKM, masyarakat dan institusi Pendidikan dapat meningkatkan kapasitas *supply* pariwisata dan ekonomi kreatif Sulut. Dalam kapasitas penuh, sektor pariwisata akan menjadi penyumbang penyerapan tenaga terbesar di Sulut. Tidak ditemukan adanya Rencana Induk Pengembangan yang disusun Pemerintah Sulut untuk sektor ekonomi kreatif. Ditemukan adanya permasalahan

dalam legalitas, permodalan, pemasaran, dan keterampilan manajerial pada UMKM sektor ekonomi kreatif yang menghambat pengembangan sektor. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk menekan penyebaran COVID-19. Kajian ini menghasilkan rekomendasi bagi UMKM, pemerintah, dan masyarakat Sulawesi Utara untuk dapat membangun kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Bab 5** oleh Sri Milawati Asshagab, Niche Evandani, dan Asia Miscolayati Hasanah fokus pada pemanfaatan potensi perikanan oleh UMKM di Maluku. Maluku memiliki sumber daya alam melimpah pada sektor perikanan, namun pemanfaatan potensi lokal tersebut masih belum optimal. UMKM mendominasi struktur industri pengolahan perikanan di Indonesia yang secara umum masih berfokus pada pasar domestik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi pengembangan UMKM perikanan di Maluku agar dapat meningkatkan daya saing ekspor sektor tersebut pada kompetisi global.

Pemetaan yang dilakukan pada kajian ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih relatif rendah yang ditunjukkan dari belum adanya produk olahan perikanan yang mendominasi pasar ekspor. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi investasi secara jangka panjang dengan melibatkan kolaborasi multi-pihak yang diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi pada komponen-komponen produksi dan pemasaran, jaminan mutu, sumber daya manusia dan permodalan, dan infrastruktur.

**Bab 6** oleh Tri Wahyuningsih memuat studi kasus pengembangan wisata pandai dan ekonomi kreatif di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pariwisata, khususnya wisata pantai, dan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu industri gaya baru di Kabupaten Buru, Maluku yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat apabila potensi wisata pantai dan ekonomi kreatif yang dimiliki dapat dikembangkan. Strategi kajian studi kasus ini dapat direplikasi untuk meneliti hal serupa di daerah lain.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat 21 wisata pantai yang tersebar di 14 desa dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Buru masih belum beragam jenisnya dan yang paling banyak memiliki potensi adalah kerajinan, kuliner dan seni pertunjukkan. Strategi utama yang menjadi prioritas untuk mengembangkan wisata pantai adalah pemerintah daerah Kabupaten Buru membuat paket wisata pantai yang terintegrasi dengan wisata lainnya (wisata agro, wisata alam, dan lainnya) dalam satu paket destinasi wisata di Buru, sedangkan untuk ekonomi kreatif adalah dengan mengadakan pelatihan penerapan teknologi dan peningkatan keterampilan SDM guna menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

Untuk menunjang strategi tersebut diperlukan komitmen *stakeholder* untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas yang terdiri atas akademisi, pemerintah, swasta/bisnis, masyarakat/komunitas, dan media (*penta helix*). Kajian ini merekomendasikan strategi pengembangan parekraf terintegrasi (wisata agro, wisata alam, wisata sejarah dll.) serta mengadakan pelatihan penerapan teknologi dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia guna menghasilkan produk ekonomi kreatif yang sesuai dengan keinginan pasar. Pemerintah Kabupaten Buru juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang mempermudah proses investasi. Pihak swasta hendaknya diberi keluasaan dalam pengembangan areal potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Buru dengan adanya peraturan daerah yang tidak memberatkan pengembangan daerah untuk parekraf.



**Bab 7** oleh Cornelis Deda, Chatarina Sri Prapti Jektiningsih, Trifosa Dimara, dan Meiyanti Widyaningrum fokus pada analisis pengembangan pariwisata di Raja Ampat, Papua. Kabupaten Raja Ampat merupakan destinasi yang unggul dalam bidang wisata bahari di Indonesia Timur. Keunggulan ini mendorong pemerintah berusaha mengembangkan pariwisata di kawasan ini. Upaya pemerintah tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk dari sektor swasta dan penduduk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah menyiapkan pelaku usaha di Raja Ampat; bagaimana pemerintah daerah mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata; dan bagaimana pelaku usaha mendukung pariwisata.

Kajian ini menemukan bahwa pelaku usaha terlibat dalam pariwisata dengan mengembangkan usaha ekonomi kreatif namun belum mampu mengelola keuangan mereka dengan baik. Lebih lanjut, pemerintah daerah memperlihatkan kesungguhan memajukan pariwisata, tetapi infrastruktur pariwisata belum memadai. Sementara pengusaha lokal mendukung pariwisata namun terkendala permodalan. Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa peran pemerintahan di kampung-kampung di Raja Ampat masih minim dalam usaha memajukan pariwisata.

Rekomendasi dari hasil kajian ini menitikberatkan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memacu pengembang *home industry* penyangga sektor parekraf, peningkatan kerja sama dalam *training* penduduk lokal dengan berbagai lembaga internasional, peningkatan kemudahan berusaha bagi usaha lokal, pembekalan *skill* bisnis seperti *marketing* dan pelaporan keuangan bagi UMKM, juga usaha mendorong sektor keuangan untuk mempermudah akses kredit bagi pengusaha lokal. Lebih lanjut, dalam pengembangan parekraf di Raja Ampat, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pusat dalam menyiapkan infrastruktur transportasi laut. Infrastruktur lain seperti fasilitas internet yang stabil, ketersediaan ATM, dan sistem pembayaran non tunai juga penting untuk dikembangkan di Raja Ampat.

Selain permasalahan dan solusi pengembangan yang termuat dalam bab dua sampai tujuh sebagaimana dirangkum di atas, pengembangan parekraf dan UMKM di Indonesia Timur tidak bisa dilepas-pisahkan dari usaha mengatasi permasalahan struktural pembangunan yang ada. Terdapat enam poin struktural yang dapat menjadi fokus: Akses sumber daya alam, akses udara, akses utilitas, akses pendidikan, akses layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Perusahaan akomodasi atau pariwisata tidak boleh menutup akses ke pantai atau laut. Akses berupa jalan harus terbuka bagi seluruh masyarakat. Terkait akses udara, diperlukan usaha mendorong penerbangan internasional dan domestik yang memadai dan terjangkau untuk dapat mencapai daerah-daerah di Indonesia Timur. Akses utilitas perlu diperbaiki dengan peningkatan elektrifikasi di Indonesia timur, pembangunan infrastruktur jalan penghubung, serta menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Pendidikan perlu ditingkatkan, bukan hanya secara kuantitas, melainkan juga dari segi kualitas pengajar dan pelajaran. Pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, limbah, dan sanitasi perlu menjadi perhatian bersama. Perluasan akses dan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, dan juga di daerah lain, perlu dipadukan dengan penyediaan energi baru terbarukan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.